

KOMISI JPIC
SEBAGAI ALAT MISI GEREJA KONTEMPORER
Oleh Alexander Jebadu SVD

Pendahuluan

Badan Gereja yang populer dikenal dengan singkatan Komisi JPIC (*Justice, Peace and Integrity of Creation* atau Komisi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan, KPKC) merupakan sebuah badan resmi Gerejani yang ada di tingkat kepausan, tingkat Gereja Nasional, tingkat keuskupan dan di setiap kongregasi religious. Sehingga ada Dewan Keadilan dan Perdamaian Kepausan. Ada Komisi: JPIC OFM Internasional, JPIC SVD Sejagat, JPIC OFM Indonesia, JPIC Provinsi SVD Ende, JPIC SVD Timor, JPIC Keuskupan Ruteng, JPIC Keuskupan Larantuka, dan seterusnya. Tugasnya sangat profetis dan liberatif. Komisi ini atas nama Gereja dalam kerjasama dengan seluruh Gereja, dengan para penganut agama-agama lain dan dengan semua orang yang berkehendak baik diberi mandat untuk membela orang miskin atau manusia pada umumnya yang martabat kemanusiaannya ditindas dan dibelenggu (*option for the poor*) dan sumber-sumber hidupnya dirampas dan dieksploitasi (*option for creation*) oleh struktur sosial ekonomi dan politik yang tak adil. Tapi sayangnya, ada banyak orang yang tidak memahami badan Gerejani ini dan misi mulianya.

Pada tahun 2000-an, warga masyarakat petani di daerah pedesaan di Flores dan di NTT pada umumnya menjerit histeris. Lahan-lahan mereka diransek dan diobrak-abrik perusahaan-perusahaan-transnasional yang mengeksploitasi mineral yang ditemukan di bawah lahan-lahan pertanian mereka tanpa berkat restu mereka. Setelah diadvokasi oleh Gereja yang dipionir oleh Komisi JPIC, para petani di daerah pedesaan di Flores akhirnya berani bangkit berdiri melawan perusahaan pertambangan transnasional dan pemerintah daerah yang berselingkuh kepentingan dengan mereka. Dalam misi advokasi pembebasan para warga petani miskin di daerah pedesaan ini, Komisi JPIC mendapat perlawanan yang tidak sedikit. Banyak orang yang mempertanyakan sepak terjangnya. Jangankan warga masyarakat yang beragama lain, orang-orang Kristen Katolik sendiri, termasuk sejumlah pastor, suster dan bruder, pada mulanya tidak banyak mengerti tentang hakikat Komisi JPIC. Akibatnya mereka sempat enggan untuk mendukung apalagi berpartisipasi langsung dalam kegiatan misi pembebasan Komisi JPIC.

Seorang bupati di Flores, yang kebetulan beragama Kristen Katolik, dalam sebuah seminar tentang masalah pertambangan di Flores pada tahun 2010 sangat bersikap tidak simpatik terhadap Komisi JPIC. Dia, misalnya, menunjukkan sikap tidak simpatik ini dengan memplintir singkatan JPIC: “Yaa..? Komisi apa itu? Komisi *Gipi de Ipi*¹ [JPIC]? Komisi ini dapat kuasa dari mana sampai berani mencampuri dan bahkan melawan pemerintah daerah sehubungan dengan kebijakannya untuk mengeluarkan Isin Usaha Pertambangan (IPU) kepada perusahaan-

¹ “Gipi de Ipi” adalah bahasa daerah Manggarai. “Gipi” artinya kumis. Sedangkan “Ipi” adalah panggilan manis untuk nama orang Siprianus. Sehingga Komisi *Gipi de Ipi* sebagai hasil pelintiran JPIC dari bupati ini artinya Komisi Kumis dari Siprianus.

perkusahaan asing?" Dalam rangka mengedukasi publik, artikel ini bertujuan untuk mempresentasikan sejarah asal-usul dari Komisi JPIC Gereja dan mandat misi pembebasan terhadap orang miskin dan alam ciptaan yang diembannya.

Lahir dari Rahim Konsili Vatikan II

Kalau lembaran sejarah Gereja dibuka, maka sesungguhnya komitmen missioner Gereja yang membebaskan orang miskin (*option for the poor*) dan alam ciptaan (*option for creation*) sudah setua usia Gereja itu sendiri. Misi pembebasan Gereja ini memiliki dasarnya dalam misi pembebasan Allah sendiri yang dijalankan oleh para nabi seperti yang diceritakan oleh Alkitab khususnya Perjanjian Lama dan dalam karya pelayanan publik Yesus seperti yang diceritakan oleh Alkitab bagian Perjanjian Baru. Namun komitmen misioner ini dirumuskan secara sistematis sebagai sebuah doktrin sosial baru dibuat untuk pertama kalinya pada tahun 1891 melalui penerbitan Ensiklik *Rerum novarum* (Tentang Modal atau Kapitalisme dan Kaum Buruh) dari Leo XIII.

Ensiklik ini, yang dianggap sebagai ensiklik pertama yang mengupas isu-isu sosial, ditulis sebagai tanggapan profetis Gereja Kristen Katolik terhadap masalah-masalah sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh revolusi industri yang menggelora saat itu. Lalu selama Konsili Vatikan Kedua berlangsung (1962-1965), Gereja Kristen Katolik mulai menjadi semakin sadar akan kepedulian dan solidaritasnya dengan seluruh umat manusia khususnya warga masyarakat miskin dan semua orang yang menderita karena memikul berbagai bentuk kuk ketidakadilan sosial. Gereja tujukan misi pembebasan ini kepada semua apapun ras, suku, agama maupun bangsanya.

Dalam *Gaudium et Spes*, salah satu dokumen dari Konsili Vatikan II, bapa-bapa konsili melihat Gereja sebagai satu bagian konstitutif dari masyarakat dunia yang tidak bisa hanya berdiam diri dalam menghadapi masalah-masalah dunia. Dengan latarbelakang pemikiran ini, Gereja mengatakan: "Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan warga masyarakat dunia zaman ini, terutama mereka yang miskin atau menderita oleh pelbagai sebab, semua hal ini adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan dari para pengikut Yesus Kristus juga."² Selama Konsili Vatikan II juga, sambil di satu pihak tetap menyadari bahwa Gereja Kristus tidak boleh terlibat langsung dalam menjalankan roda tatanan kehidupan politik, sosial dan ekonomi, Gereja di pihak lain yakin bahwa tatanan dunia – sosial, ekonomi dan politik – perlu diinspirasi oleh hukum ilahi:

[Yesus] Kristus, yang pasti, tidak memberi Gereja-Nya sebuah misi tertentu dalam tatanan politik, ekonomi atau sosial. Tujuan yang ditetapkanNya bagi Gereja adalah hal-hal yang bersifat religius. Tapi dari misi religius ini muncul sebuah fungsi, sebuah cahaya dan sebuah energi yang dapat melayani struktur dan mengkonsolidasikan masyarakat manusia menurut hukum ilahi. Karena dalam kenyataannya, jika keadaan dan tempat membutuhkan, ia [Gereja] dapat, dan memang harus, memulai aktivitas-aktivitas atas nama semua orang, terutama yang dirancang untuk orang-orang miskin, seperti karya amal dan usaha-usaha sejenis.³

²ECUMENICAL COUNCIL OF VATICAN II, Pastoral Constitution *Gaudium et Spes* (7th of December 1965), No. 1.

³Ibid., No. 42.

Dari kesadaran pastoral baru yang mendesak sehubungan dengan masalah ketidakadilan sosial di dunia, maka selama Konsili Vatikan II Gereja sangat merekomendasikan pembentukan sebuah badan kepausan yang nanti berkarya di bidang keadilan dan perdamaian:

Konsili Vatikan II, mengingat begitu besarnya penderitaan yang masih menimpa sebagian besar umat manusia dewasa ini, memutuskan bahwa sebuah *organisme* [organisasi] *Gereja universal* mesti dibentuk sehingga baik keadilan maupun kasih Kristus terhadap orang miskin dapat dikembangkan di mana-mana. Peran badan Gerejani ini [yang akan dibentuk nanti] adalah untuk mendorong umat Kristen Katolik menolong kemajuan di wilayah orang-orang miskin dan keadilan sosial secara internasional.⁴

Sebagai tindak lanjut dari himbauan ini, maka pada tahun 1967 – dua tahun setelah Konsili Vatikan II berakhir (1965) – Paus Paulus VI membentuk *Komisi Keadilan dan Perdamaian Kepausan*. Dalam pidato yang diberikannya kepada para anggota dan konsultan badan ini pada tgl 20 April 1967, Paulus VI menggambarkan komisi ini sebagai atau bagaikan seekor ayam jago yang bertengger di atas bubungan dari tubuh Gereja yang menyerukan pengawasan terhadap seluruh program misi pembebasan Gereja, terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan keadilan dan perdamaian di dalam setiap aspek kehidupan manusia. Selengkapnyanya Paus Paulus VI dalam pidatonya mengatakan:

Anda [Komisi Keadilan dan Perdamaian Vatikan] mewakili kita untuk merealisasikan *voting* terakhir dari Konsili Vatikan II (GS 9). Hari ini, seperti halnya di masa lampau, begitu pembangunan dari sebuah Gereja atau sebuah menara lonceng selesai, maka seekor ayam jantan ditempatkan di atas bubungannya sebagai simbol kewaspadaan bagi iman dan bagi seluruh program hidup Kristen. Atas cara yang sama, Komisi [Keadilan dan Perdamaian] ini telah ditempatkan di atas bubungan Konsili Vatikan Kedua sebagai sebuah bangunan spiritual, dan misinya tak lain daripada menjaga agar mata Gereja tetap terbuka, hatinya sensitif dan tangannya siap untuk pekerjaan amal yang direalisasikan di dunia, sehingga dapat mempromosikan kemajuan warga masyarakat miskin dan mempromosikan keadilan sosial di antara bangsa-bangsa.⁵

Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian serta Mandatnya

Setelah melewati satu masa percobaan selama sepuluh tahun, Paus Paulus VI memberikan komisi ini sebuah statusnya yang definitif dengan menerbitkan *Motu Proprio, Justitiam et Pacem* pada tanggal 10 Desember 1976. Pada tanggal 28 Juni 1988, Paus Yohanes Paulus II mengubah nama badan Gereja ini dari *Komisi Keadilan dan Perdamaian* menjadi *Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian*. Sehubungan dengan tujuan dan mandat yang diberikan kepada Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, Konstitusi Apostolik *Pastor Bonus* 1988 mengidentifikasikannya sebagai berikut:

Tujuan dari Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian adalah untuk mempromosikan keadilan dan perdamaian di seluruh dunia sesuai dengan [nilai-nilai] Injil dan ajaran sosial Gereja. 1) Dewan Kepausan ini akan membuat studi yang menyeluruh [dan mendalam] tentang ajaran sosial Gereja dan memastikan bahwa ajaran sosial Gereja ini disebarluaskan dan dipraktekkan dalam kehidupan banyak orang dan warga masyarakat, khususnya [ajaran sosial Gereja] mengenai relasi antara kaum buruh dan manajer, yaitu sebuah relasi yang semakin dijiwai oleh semangat Injil. 2) Ia [Dewan Kepausan ini] mengumpulkan pelbagai informasi dan hasil penelitian tentang keadilan dan perdamaian, tentang pembangunan dan pelanggaran hak asasi manusia; Dewan

⁴Ibid., No. 90.

⁵*Discours du Pape Paul VI Aux Membres et Consultants de "Iustitiae et Pax"*, 20 April 1967. Teks asli adalah Bahasa Perancis.

Kepausan ini harus mendalami semua hal ini, dan, bila perlu, kesimpulan-kesimpulannya [hasil studi isu-isu sosial, ekonomi, politik dan pembangunan] dilaporkan dan dibicarakan dengan para uskup. Dewan Kepausan ini akan memelihara relasi yang baik dengan organisasi-organisasi Katolik internasional dan lembaga-lembaga lainnya, bahkan dengan lembaga-lembaga yang bukan dari Gereja Katolik, yang juga sungguh-sungguh memperjuangkan perdamaian dan keadilan dunia. 3) Dewan Kepausan ini akan bekerja untuk membantu pembentukan mental masyarakat bangsa-bangsa yang cinta damai, terutama pada kesempatan Hari Perdamaian Dunia.⁶

Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan dan Kongregasi Religius

Setelah Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian didirikan pada tahun 1967, Komisi-Komisi Keadilan dan Perdamaian juga mulai perlahan-lahan didirikan di tingkat nasional, regional dan keuskupan di setiap negara di seluruh dunia serta di setiap kongregasi religius dalam Gereja Kristen Katolik. Selama Konferensi Uskup-Uskup Katolik Amerika Latin II (CELAM II) di Medellin 1968, para Uskup Amerika Latin langsung menyadari perlu didirikannya Komisi Keadilan dan Perdamaian di seluruh Gereja Amerika Latin: "Komisi Keadilan dan Perdamaian harus dipromosikan di semua negara [di seluruh Amerika Latin], sekurang-kurangnya di tiap-tiap negara."⁷

Di tingkat Kepausan di Vatikan, komisi ini tetap disebut dengan nama **Dewan** Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian (*Pontifical Council for Justice and Peace*). Sedangkan di keuskupan-keuskupan dan pelbagai Kongregasi Religius, komisi ini disebut **Komisi** Keadilan dan Perdamaian (*Commissions for Justice and Peace*). Lalu pada tahun 1990-an, dengan mengikuti jejak Dewan Gereja-Gereja Kristen Protestan Se-Dunia (*The World Council of Churches*), Gereja Kristen Katolik mengubah nama komisi ini menjadi Komisi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (Komisi KPKC atau Komisi JPIC = *Commission for Justice, Peace and Integrity of Creation*). Nama ini dengan sendirinya menunjukkan ada relasi yang sangat erat antara isu keadilan sosial ekonomi dan masalah alam ciptaan, antara pilihan untuk memihak orang miskin (*option for the poor*) dan pilihan untuk memihak alam ciptaan (*option for creation*). Di keuskupan-keuskupan dan kongregasi-kongregasi religius Gereja Kristen Katolik, mandat misi dari Komisi JPIC mengambil pola pada mandat misi dari Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian. Di antara beberapa tujuan utama dari Komisi JPIC di tingkat keuskupan dan kongregasi religius adalah seperti yang diringkas oleh Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan dari Ordo Fransiskan pada tahun 2008:

1) Untuk memberi pencerahan bagi Umat Allah serta bagi para anggota Kongregasi Religius, tentang isu-isu keadilan, pembangunan, hak asasi manusia, perdamaian dan keutuhan alam ciptaan baik di tingkat nasional maupun internasional. 2) Untuk meningkatkan kesadaran di antara anggota Kongregasi Religius [dan seluruh umat Kristen Katolik] untuk memikirkan kembali gaya hidup mereka dan misi mereka di tengah dunia yang ditandai dengan ketidakadilan yang merajalela, kekerasan dan kemiskinan, agar tindakan mereka konsisten dengan iman mereka. 3) Untuk menumbuhkan komitmen para anggota koregasi religius, umat beriman dan semua warga negara di bidang kegiatan sosial politik dan kemasyarakatan. 4) Untuk mempromosikan keadilan,

⁶JOHN PAUL II, Apostolic Constitution *Pastor Bonus* of 1988 (Rome, 28th of June 1988), No. 142-143.

⁷CELAM II, *Human Promotion: Justice* (Medellin, 6th of September 1968), No. 21.

perdamaian dan hak-hak asasi manusia, yang akan mengkonkretkan kontribusi dari Kongregasi Religius [dan keuskupan-keuskupan] di bidang-bidang ini [sosial, ekonomi dan politik].⁸

Pelayanan misi untuk membebaskan kaum miskin dan menjaga keutuhan alam ciptaan begitu mendesak sekarang ini sehingga hampir setiap keuskupan dan kongregasi religius di dalam Gereja Kristen Katolik di seluruh dunia telah memiliki sebuah Komisi JPIC masing-masing. Komisi-Komisi JPIC ini beranggotakan seluruh umat Katolik di dalam sebuah keuskupan dan semua anggota dari sebuah Kongregasi Religius di mana saja di seluruh dunia. Mereka yang ditunjuk sebagai pemimpin JPIC, entah di sebuah keuskupan atau di sebuah kongregasi religius, hanya berperan sebagai koordinator. Oleh karena itu, misi pembebasan Gereja untuk bersolider dengan orang miskin yang tertindas, membela hak-hak sosial dan ekonomi mereka, melindungi dan menjaga keutuhan alam ciptaan dan mengutuk semua penyebabnya dalam bentuk struktur-struktur sosial, ekonomi dan politik tidak adil bukan merupakan sebuah misi yang dimonopoli hanya oleh orang-orang yang ditunjuk untuk memimpin Komisi JPIC tapi merupakan misi kenabian dari semua orang Kristen dalam setiap keuskupan, dari semua anggota dari setiap kongregasi religius dan dari semua Gereja Kristen.

Mengenai jaringan kerjanya, JPIC dapat bekerjasama dan berkolaborasi dengan para pengikut agama-agama lain, organisasi-organisasi sosial seperti LSM-LSM dan dengan semua orang yang berkehendak baik. Sehubungan dengan berbagai jaringan kerja JPIC ini, Rev Charles Rue, Koordinator JPIC dari Kongregasi Kolumban di Australia, melukiskan hal ini sebagai berikut: "Karya Komisi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan merupakan milik semua warga negara, semua orang yang beriman dan semua lembaga sosial. Partner dalam karya [JPIC] ini ada banyak, mulai dari ABC hingga LSM-LSM dan agama-agama lain."⁹

Penutup

Presentasi dari artikel ini dengan jelas menunjukkan bahwa Komisi JPIC dari Gereja Kristen Katolik, baik yang berada pada tingkat kepausan, Gereja nasional, Gereja keuskupan maupun yang ada dalam setiap kongregasi religius Gereja Kristetn Katolik merupakan sebuah badan resmi Gerejani. Ia lahir dari Konsili Vatikan II (1962-1965) yang semakin sadar akan misi keselamatannya yang semakin kompleks dan menyeluruh (*holistic*) di dalam dunia modern.

Sejak Konsili Vatikan II, Gereja perlahan-lahan menyadari bahwa misi keselamatan Allah yang diemban oleh Gereja tidak hanya meliputi usaha penyelamatan jiwa-jiwa manusia dari belenggu Setan dan meluputkannya dari kutukan neraka abadi. Sebaliknya, sasarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik rohani dan jasmani, baik demi kebahagiaan hidup di akhiran maupun demi kesejahteraan hidupnya selama berada di dalam dunia ini. Karena itu

⁸Office for Justice, Peace and Integrity of Creation of Order of Friar Minors, *Guidelines for Animation of Justice, Peace and Integrity of Creation* (Rome, 2008), pp. 9-10. Sistem penomoran berasal dari saya.

⁹RUE Rev. Charles, "Motivation and history of JPIC work" in <http://www.columban.org.au/our-works/JPIC-Justice-Peace-Integrity-of-Creation/what-is-jpic/motivation-and-history-of-jpic-work/> (diakses pada tgl 12/3/ 2012, teks asli berasal dari saya).

segala sesuatu, termasuk struktur-struktur sosial ekonomi dan politik yang menindas dan membelenggu manusia perlu ditentang secara profetis. Sejak Konsili Vatikan II, karya misi pembebasan di bidang khusus ini dikoordinir oleh Komisi JPIC.@@

KEPUSTAKAAN:

CELAM II, *Human Promotion: Justice*. Medellin, 6th of September 1968.

Discours du Pape Paul VI Aux Membres et Consultants de "Iustitiae et Pax". Vatican, 20 April 1967.

ECUMENICAL COUNCIL OF VATICAN II, Pastoral Constitution *Gaudium et Spes*. Vatican, 7th of December 1965.

JOHN PAUL II, Apostolic Constitution *Pastor Bonus* of 1988. Rome, 28th of June 1988

Office for Justice, Peace and Integrity of Creation of Order of Friar Minors, *Guidelines for Animation of Justice, Peace and Integrity of Creation*. Rome, 2008.

RUE Rev. Charles, "Motivation and history of JPIC work" in <http://www.columban.org.au/our-works/JPIC-Justice-Peace-Integrity-of-Creation/what-is-jpic/motivation-and-history-of-jpic-work/>.